

BAB I

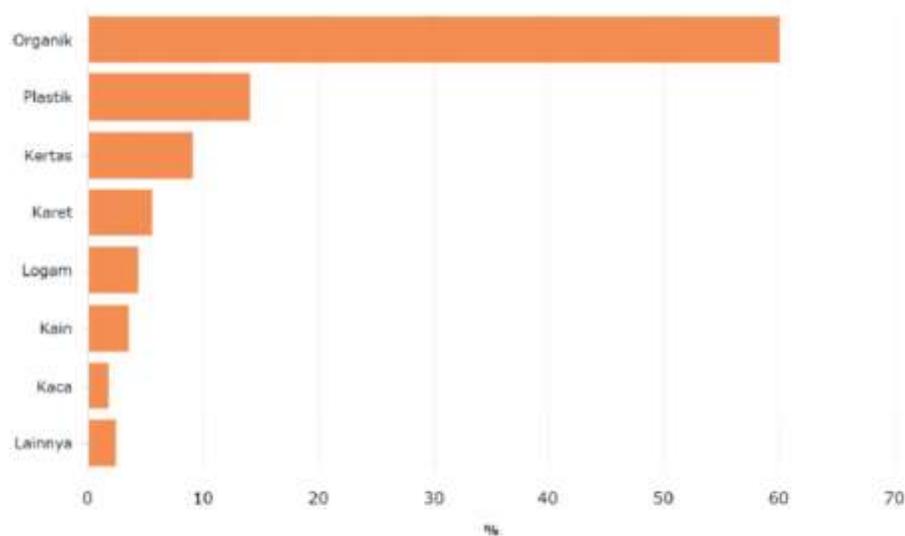
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan sampah dewasa ini makin banyak diperbincangkan oleh khayalak luas. Sampah menjadi problematika yang cukup sulit untuk diatasi mengingat laju peningkatan penghasil sampah yang berasal dari produksi makanan dan minuman, kebutuhan pokok seperti pakaian, alat-alat atau perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi. Permasalahan sampah kian dipersulit oleh karena sebagian besar produk penghasil sampah sulit untuk diurai atau didaur ulang seperti sampah anorganik dimana hal tersebut dapat menyebabkan pencemaran tanah akibat penimbunan sampah didalam tanah dalam kurun waktu yang lama. Pada setiap tahunnya, sampah yang dihasilkan oleh masing-masing kota di dunia dapat mencapai angka 1,3 miliar ton. Bank Dunia memperkirakan bahwa total sampah pada tahun 2025 mampu meningkat mencapai 2,2 miliar ton dan Indonesia pertahunnya diprediksi mampu membuah hasilkan sampah sejumlah 64jt ton. Sampah organik ialah jenis sampah yang mendominasi komposisi sampah di Indonesia dengan jumlah sebanyak 60% dari total keseluruhan sampah dengan jenis lainnya, hal tersebut merupakan pernyataan dari *Ministry of Environment and Forestry* atau Kementerian Lingkungan Hidup RI. Unsur sampah jenis lainnya yaitu sampah plastik menghasilkan sebanyak 14% sampah disusul sampah kertas sebanyak 9%, karet sebanyak 5,5%, dan sampah jenis lainnya seperti kaca, logam, kain, dan lain-lain.

Berikut adalah gambar statistik diagram yang menjelaskan Komposisi Sampah Perkotaan di Indonesia yang mampu mengalir ke laut pada Grafik 1.1.

Grafik 1.1
Komposisi Sampah di Indonesia Berdasarkan Jenis Tahun 2017



Sumber : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2017)

Pada tahun 2018 Japan International Cooperation Agency (JICA) mengemukakan bahwa di tahun 2020 Indonesia diprediksi akan mengalami peningkatan jumlah sampah yang terdiri dari limbah padat rumah tangga sebanyak lima kali lipat. Perkiraan tersebut ditulis oleh JICA dalam Draft Naskah Akademis yang berisi tentang Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Persampahan. Sampah yang diangkut petugas kebersihan di daerah perkotaan baru sebanyak 11,25 %, sedangkan di daerah pedesaan sekitar 19 %. Sisa sampah lainnya dibakar, dijadikan pupuk/kompos, serta dibuang ke kali atau di buang di sembarang tempat. Berikut

gambar statistik yang didapatkan melalui Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta yang menampilkan perkiraan keseluruhan sampah yang menerus ke TPS Akhir Bantar Gebang dari tahun 2017 hingga 2019.

Gambar 1.1

Rata-rata Jumlah Sampah yang Masuk ke Tempat Pembuangan Sampah Terakhir (TPST) Bantar Gebang Perhari (Tonase) 2017-2019



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta (2020)

Pada rincian yang dipaparkan, bisa dilihat saat tahun 2019, kurang lebih 6,7 ribu ton sampah masuk setiap hariannya ke TPST Bantargebang. Angka tersebut menunjukkan adanya penurunan kurang lebih 11 persen dari tahun 2018. Setiap tahunnya jumlah sampah akan terus menurun jika Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta serta pemerintah daerah menetapkan kebijakan daerah yang bertautan dengan penurunan sampah dan terus menambah serta menggalakkan kegiatan strategis daerah (Khoirun Nisa, 2020). Masalah sampah di Jakarta merupakan permasalahan yang cukup serius sehingga memerlukan perhatian khusus. Untuk mengatasi permasalahan

sampah pemerintah DKI Jakarta membuat kebijakan mengenai penanganan sampah. Kebijakan penanganan sampah tertuang pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 mengenai Pengelolaan Sampah yang menjadi bagian perubahan dari Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 mengenai Pengelolaan Sampah.

Melihat permasalahan sampah yang ada di DKI Jakarta, terdapat TPS (Tempat Pembuangan Sampah) kecil di Kramat Jati yang lokasinya berada di depan jalan umum yang berdekatan dengan perumahan warga setempat. Jalanan tersebut biasa dilalui warga setiap hari karena aksesnya terhubung langsung dengan pasar Kramat Jati. TPS yang terbilang cukup kecil tersebut seringkali membuat warga yang lalu-lalang di sekitar TPS merasa tidak nyaman akibat bau tidak sedap yang menyeruak di jalanan dan sampah-sampah yang seringkali menumpuk di pinggir jalan. Tidak jarang sampah-sampah tersebut berserakan hingga ke tengah jalan. Saat hujan turun, jalanan disekitar TPS menjadi lebih suram akibat adanya genangan air yang bercampur dengan cairan dari sampah yang beraroma busuk. Keadaan tersebut tentu membuat warga yang sampai saat ini masih menggunakan jalanan tersebut merasa tidak nyaman.

Berangkat dari permasalahan tersebut, riset ini dilaksanakan untuk menganalisis serta mengetahui pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta. Apakah pengurusan anggaran sampah di TPS Kramat Jati sudah sesuai dengan kebijakan pengelolaan sampah yang dibuat melalui pemerintah provinsi DKI Jakarta. Dalam tahapan kebijakan publik, proses tersebut

disebut sebagai implementasi kebijakan. Affan Gaffar (2009) mengatakan jika implementasi ialah salah satu fase pada sistem kebijakan publik. Implementasi akan dilihat berdasarkan studi pengelolaan sampah di TPS Kramat Jati, Jakarta Timur terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah melalui Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta. Studi dilaksanakan guna mengetahui apakah kebijakan penanganan sampah seperti pengurusan anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta dengan Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta telah diimplementasikan dengan baik. Apakah para pekerja yang ditugaskan mengolah sampah telah mengerjakan tugasnya dengan baik dan telah sesuai dengan kebijakan pengelolaan sampah. Penulis memilih TPS Kramat Jati sebagai lokasi penelitian dikarenakan TPS tersebut memiliki permasalahan yang berkaitan dengan implementasi kebijakan pengelolaan sampah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasar pada latar belakang bisa ditarik rumusan masalah berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta?
2. Apa saja faktor yang turut memengaruhi implementasi kebijakan pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta terhadap pengelolaan sampah di TPS Kramat Jati?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari riset ini yakni:

1. Guna menganalisa implementasi kebijakan pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta terhadap pengelolaan sampah di TPS Kramat Jati
2. Guna mengetahui apa saja faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta terhadap pengelolaan sampah di TPS Kramat Jati.

1.4 Manfaat Penelitian

Diharapkan hasil penelitian bisa berdampak manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan hasil dengan menambah literatur studi implementasi kebijakan, khususnya objek studi pengelolaan sampah pada Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta di TPS Kramat Jati, Jakarta Timur.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber informasi untuk Pemprov DKI Jakarta selaku pihak pembuat kebijakan dalam mengatasi permasalahan sampah terkhusus pada TPS Kramat Jati, Jakarta Timur untuk menyusun kebijakan,

pengelolaan anggaran, peraturan, maupun program-program yang efektif dan efisien. Penelitian ini juga diharapkan menjadi dasar untuk penelitian lanjutan yang lebih luas lingkup substansi maupun areanya.

1.5 Kerangka Teori

1.5.1 Implementasi Kebijakan Publik

Istilah kebijakan atau kebijaksanaan memiliki banyak makna. Ananda dkk (2020) mengatakan bahwa kebijakan selalu dikaitkan dengan upaya penyelesaian suatu masalah. Analisis pada program atau peraturan yang bermaksud untuk mencapai suatu tujuan tertentu merupakan pengertian sederhana dari kebijakan. Hogwood dan Gunn seperti dikutip Parsons (dalam Handoyo, 2012:4) berpendapat bahwa terdapat 10 penggunaan istilah kebijakan yaitu sebagai sebuah proses, output, hasil (outcome), program, label untuk sebuah bidang aktivitas, teori atau model, otorisasi formal, proposal spesifik, ekspresi tujuan umum atau kegiatan pemerintah yang diharapkan, dan sebagai keputusan pemerintah. Menurut Iskandar (dalam Ramdhani dan Ramdhani, 2017) definisi kebijakan ialah sebagai suatu rancangan program, kegiatan, aksi, ketetapan serta sikap yang dilakukan oleh pihak atau aktor-aktor dalam bertindak ataupun tidak bertindak sebagai tahapan guna penyelesaian masalah yang dihadapi. Untuk mencapai tujuan diperlukan penetapan kebijakan sebagai faktor penting dalam suatu organisasi.

Handoyo (2012) menyatakan jika, “kebijakan publik yakni suatu langkah yang dikerjakan oleh pemerintah demi pemenuhan akan kebutuhan masyarakat.” Umumnya kebijakan publik ditentukan melalui pihak pemerintah. Kebijakan memiliki komponen atau faktor-faktor yang dapat dimengerti mengapa kebijakan tersebut diperlukan. Tujuan kebijakan, masalah, tuntutan (*demand*), dan dampak (*outcomes*) merupakan 4 (empat) unsur penting dari kebijakan. Level kebijakan dapat berupa tingkatan umum, tingkatan implementasi serta tingkatan teknis. Kebijakan dibentuk dengan kesengajaan guna merealisasikan tujuan tertentu. Gaffar (2009) dalam buku karangannya yang berjudul “Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi” mengemukakan salah satu tahapan pada sistem kebijakan publik adalah pengimplementasian. Pada umumnya, sesudah kebijakan dirumuskan berdasarkan tujuan yang jelas barulah implementasi dilaksanakan. Implementasi merupakan satu rangkaian aktifitas yang dilakukan guna menyampaikan suatu kebijakan kepada masyarakat supaya kebijakan tersebut memperoleh dampak atau hasil yang sejalan bersama capaian yang telah diputuskan. Dunn (2003) mengatakan jika, “implementasi kebijakan adalah pengambilan serta pelaksanaan melalui unit-unit administrasi yang mengintegrasikan sumber daya finansial serta SDM.”

Grindle (dalam Nugroho, 2008) mengemukakan jika, “tingkat keberhasilan implementasi kebijakan dilihat dari kebijakan yang telah ditransformasikan sebelum implementasi kebijakan dilakukan.” Muslimah (2017)

berpendapat bahwa, “sesungguhnya implementasi kebijakan tak hanya bersangkutan dengan operasional dari keputusan politik atau mekanisme penjabaran dari prosedur-prosedur rutin melewati saluran birokrasi.” Implementasi kebijakan melibatkan persoalan konflik seperti keputusan dan ‘siapa mendapat apa’ dari kebijakan yang ditetapkan. Menurut Charles O. Jones (dalam Agustino, 2016:154-155) terdapat 3 (tiga) macam kegiatan penting dalam menjalani tahapan implementasi kebijakan, yaitu organisasi, interpretasi, dan penerapan. Ketiga aktivitas tersebut dijabarkan menjadi kegiatan organisasi (*organization*) yang membawa sumber daya, entitas, dan metode yang menghasilkan upaya untuk mencapai kejelasan (mengubah kebijakan menjadi hasil yang sejalan bersama keinginan serta target kebijakan), contoh: kedaulatan yang sesuai, transparansi tata cara, operasional standar, kompatibilitas tugas, beban kerja yang adil. Kegiatan interpretatif (*interpretation*) adalah kegiatan yang menjelaskan isi dan kebijakan dengan bahasa yang lebih praktis serta mudah dimengerti sehingga isi kebijakan mampu diimplementasikan dan disetujui bagi pemangku kepentingan serta tujuan kebijakan, contoh: kepastian perihal pelayanan, transparansi kewajiban, kesesuaian penyelenggaraan pelayanan, sosialisasi kebijakan serta petunjuk penyelenggaraan kebijakan. Kegiatan penerapan atau aplikasi (*applications*) adalah kegiatan pemberian layanan secara rutin dan berkelanjutan, pembayaran, atau tujuan yang sejalan dengan maksud serta tujuan kebijakan yang tersedia, seperti kepatuhan terhadap

prinsip kualitas, identifikasi layanan, penilaian keberhasilan layanan, pemberian layanan, pemantauan pencapaian layanan serta evaluasi. (Agustino, 2016)

Winarno (2005 mengutip Lester dan Stewart) mengemukakan jika pada prinsipnya implementasi kebijakan ialah langkah yang dilakukan agar tercapainya tujuan dalam suatu kebijakan. Implementasi kebijakan pada pandangan luas dikatakan sebagai alat administrasi hukum yang mana beragam aktor, organisasi, prosedur dan etnik bekerja bersama-sama untuk melaksanakan kebijakan guna menuai hasil/dampak sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Implementasi kebijakan oleh George C Edward III (1980) dalam (Subarsono, 2005) dipengaruhi melalui beberapa pandangan diantaranya ialah komunikasi, sumber daya, disposisi/respon serta struktur birokrasi. George C Edwards III dalam (Herabudin, 2016) mengatakan jika, “fase pelaksanaan ialah fase antara fase pengembangan kebijakan dan fase hasil atau pengaruh yang muncul oleh kebijakan”. Menurut Goerge Edwards III, “ada empat faktor yang berpengaruh pada kesuksesan ataupun kegagalan suatu implementasi diantaranya ialah komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.” Teori George C. Edwards III, model implementasi kebijakan ini bersifat top down, serta implementasi kebijakan dipengaruhi melalui beberapa variabel, yaitu:

1. Komunikasi

Kesuksesan implementasi kebijakan publik tergantung pada eksekutor yang memiliki pemahaman yang jelas tentang tindakan yang harus

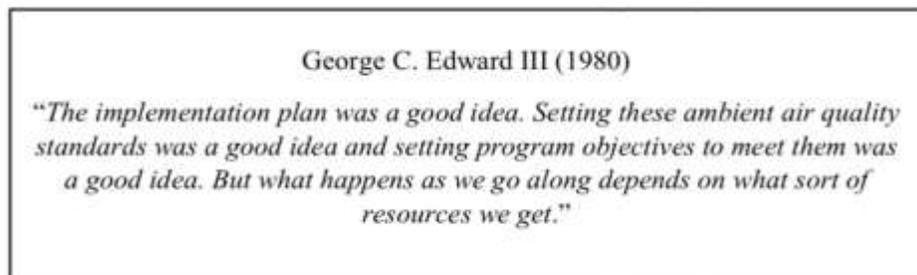
diambil. Apa yang jadi tujuan dan target kebijakan dilaporkan pada kelompok sasaran (*target group*) akibatnya mampu meminimalisir penyimpangan implementasi.

2. Sumber Daya

Dalam melaksanakan sebuah kebijakan juga dibutuhkan aspek penting seperti sumber daya. Sumber daya memiliki penjabaran yakni sumber daya manusia, sumber daya material dan sumber daya metoda. Keefektifan serta keefisienan menjadi hal utama yang ditarget pada tahap pelaksanaan kebijakan yang memerlukan sumber daya. Tanpa adanya sumberdaya, kebijakan hanya sebatas tulisan di kertas dan membentuk dokumen yang tidak terimplementasikan pada memecahkan permasalahan sosial.

Gambar 1.5.1

Kutipan George C. Edward III mengenai Sumber Daya dalam Impelementasi Kebijakan



3. Disposisi

Disposisi pada implementasi kebijakan ialah suatu karakteristik atau ciri yang dipegang oleh implementor kebijakan. Karakteristik yang

dimiliki seperti adanya sifat demokratis, jujur, cerdas, komunikatif, dan komitmen. Jika implementor kebijakan berbeda perspektif atau mempunyai pandangan berbeda bersama kreator atau penyusun kebijakan berakibatkan pelaksanaan kebijakan dapat membentuk ketidakefektifan serta ketidakefisienan.

Implementor mempunyai kecondongan yang positif terhadap suatu kebijakan tertentu dan lebih condong melaksanakan kebijakan sesuai pada penetapan kreator atau penyusun kebijakan. Implementasi kebijakan menjadi lebih kompleks apabila implementasinya tidak sesuai dengan ketetapan kreator atau penyusun kebijakan. Hal tersebut menimbulkan akibat yaitu melebarnya interpretasi pada kebijakan. Apabila interpretasi semakin terbuka, maka akan menyebabkan kebijakan semakin sulit diimplementasikan oleh karena interpretasi yang terlalu bebas sehingga keefektifan pelaksanaan implementasi kebijakan menjadi sulit untuk dijalani.

4. Struktur Birokrasi

Implementasi kebijakan dapat berlangsung melalui penggunaan komunikasi dan sumber daya yang baik, atau dengan kecondongan yang positif. Namun kebijakan tersebut mungkin tidak akan berjalan atau terhambat apabila dalam kebijakan tersebut tidak terdapat struktur birokrasi. Terdapat dua (2) aspek dalam struktur birokrasi, yaitu SOP

serta fragmentasi. Yang pertama yaitu pengembangan sebagai respon internal pada keterbatasan waktu serta sumber daya pelaksana serta kemauan untuk konsistensi pada operasi organisasi yang elusif serta tersebar luas. Yang kedua yaitu berawal dari tekanan eksternal dari organisasi birokrasi seperti komite legislatif, kelompok pemangku kepentingan, pejabat pemerintah, konstitusi negara serta sifat kebijakan yang memiliki pengaruh pada organisasi birokrasi pemerintah.

1.5.2 Sistem Pengelolaan Sampah

Menurut Kodoatic (dalam Wulandari, 2020), “sampah adalah limbah padat ataupun setengah padat yang dihasilkan melalui aktivitas dari makhluk hidup hingga aktivitas perkotaan.” Azwar (1990) pada bukunya berpendapat jika, “sampah menjadi suatu hal yang menjadi tidak tergunana, dipakai, atau tidak disukai yang berakibat keharusan untuk dibuang.” Atas dasar Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2008 mengenai Pengelolaan Sampah, definisi limbah ialah proses alam yang berbentuk padat dan/atau sisa kegiatan sehari-hari manusia. Sampah berdasarkan sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya diperlukannya penanganan eksklusif yang disebut sampah spesifik. Sedangkan pengelolaan sampah yakni cara yang terstruktur, komprehensif serta berkelanjutan untuk kegiatan mengurangi serta menangani sampah. Sucipto (2012) menjelaskan tentang pengelolaan sampah dilihat dari jenis-jenis limbah dan berdasar pada

pemilahannya yang dibagi menurut 3 macam yakni limbah organik, anorganik, dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). Terdapat beraneka ragam macam sampah berada di lingkungan kita, seperti sampah yang berawal dari rumah tangga, pemukiman, industri, institusi/kantor/sekolah, rumah sakit, perkebunan serta masih banyak lagi.

Pengelolaan sampah dilakukan untuk menjaga lingkungan hidup serta menciptakan lingkungan hidup yang baik dengan menjaga kebersihan dan kelestariannya. Hal itu perlu dilakukan sebab masih banyak masyarakat Indonesia yang tidak sadar untuk menjaga lingkungan sekitar. Masih banyak masyarakat yang melakukan pengelolaan sampah melalui penimbunan hingga pembuangan sampah yang ada semakin menumpuk di sekitar tempat tinggal mereka. Keadaan semakin diperparah dengan masih banyaknya yang melakukan pengelolaan sampah dengan cara yang tidak bertanggungjawab seperti membuang sampah sembarangan ke sungai, kali, saluran air, dan lain-lain yang mengakibatkan lingkungan sekitar sungai, kali, saluran air, dan sejenisnya menjadi tercemar dan terhambat alirannya. Selain itu terdapat pula masyarakat yang melakukan pengelolaan sampah dengan membakar sampah yang ada sehingga menyebabkan lingkungan udara menjadi tercemar dan tidak sehat.

Pengelolaan sampah menurut Noelaka (dalam Saputro, 2020) adalah cara mewujudkan keindahan melalui pengelolaan sampah secara harmonis yang dilakukan antara rakyat dengan pengelola atau pemerintah dengan bersamaan.

Alex (dalam Saputro, 2020) menyatakan bahwa pengolahan sampah adalah aktifitas yang melibatkan pengepulan, pengangkutan, pengolahan, daur ulang, atau pembuangan sampah. Terdapat prinsip-prinsip pada penanganan limbah seperti prinsip 3R (*reduce, reuse, dan recycle*) yang mana prinsip tersebut mengelola sampah dengan cara mereduksi sampah yang selanjutnya ditempatkan ke tempat pembuangan akhir (TPA). Melalui penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa penanganan sampah yakni suatu aktivitas yang dilaksanakan guna mengonversikan sampah menjadi barang atau benda yang mempunyai nilai guna.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai pada riset ini ialah penelitian kualitatif deskriptif. Deskriptif kualitatif merupakan jenis riset yang dilakukan dengan menafsirkan serta menuturkan data terkait situasi yang sedang terjadi maupun dengan pandangan serta sikap yang dilakukan atau terjadi di dalam masyarakat. Penelitian ini memiliki tujuan untuk memperjelas fakta, kondisi, fenomena, serta keadaan yang terjadi saat penelitian sedang dilakukan serta mengguyuhkan apa adanya.

1.6.2 Situs Penelitian

Situs penelitian atau yang biasa disebut lokasi riset ialah tempat atau wilayah dimana penelitian dilaksanakan. Situs riset atau lokasi riset dalam riset ini dilakukan di TPS Kramat Jati, Jakarta Timur. Adapun pemilihan TPS Kramat

Jati menjadi lokasi penelitian karena ditemukan permasalahan pengelolaan sampah yang berkaitan dengan implementasi kebijakan pengelolaan sampah, sehingga terjadinya penumpukan sampah yang terletak di pinggir jalan di depan TPS yang menyebabkan dampak negatif lainnya.

1.6.3 Subjek Penelitian

Subjek riset berkaitan erat dengan individu atau kelompok yang dapat memberikan sumber data penelitian. Rahmadi (2011) mengatakan bahwa subjek penelitian pada penelitian kualitatif biasa disebut sebagai informan. Dengan demikian, subjek pada penelitian ini adalah informan yang merupakan bagian dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Timur, Petugas Kebersihan di TPS Kramat Jati, masyarakat, dan pihak-pihak terkait lainnya.

1.6.4 Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data dalam penelitian ini berasal dari data primer dan data sekunder. Identifikasi data yang menggunakan metode kualitatif ini berbentuk data verbal dan numerik.

1.6.4.1 Data Primer

Data primer menurut Sugiyono (2008) ialah data yang diperoleh peneliti dengan upaya pengambilan data di lapangan secara langsung. Data primer yang didapatkan peneliti pada riset ini merupakan hasil observasi permasalahan secara langsung serta hasil wawancara dari informan. Dengan demikian, data primer

pada penelitian ini berawal dari individu atau kelompok yang terlibat langsung pada pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di lingkup wilayah Jakarta Timur terkhusus daerah TPS Kramat Jati, Jakarta Timur.

1.6.4.2 Data Sekunder

Data sekunder menurut pendapat Sugiyono (2008) adalah data yang didapatkan melalui cara tidak langsung oleh peneliti. Data sekunder didapatkan melalui bermacam sumber seperti literatur, buku, jurnal, dan penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder juga dapat diperoleh melewati koran, situs lama resmi suatu instansi, dan media lainnya.

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilaksanakan dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi serta studi kepustakaan.

1.6.5.1 Observasi

Anggito dan Setiawan (2018:109) mengartikan observasi sebagai pengumpulan data penelitian langsung dari lapangan melalui proses pengamatan. Observasi dilakukan terhadap segala sesuatu yang bisa diamati didalam ruang lingkup yang terlibat langsung dalam implemntasi kebijakan pengelolaan sampah di lingkup wilayah Jakarta Timur terkhusus daerah TPS Kramat Jati, Jakarta Timur.

1.6.5.2 Wawancara

Wawancara ialah dialog diantara pewawancara (*interviewer*) yang memberikan pertanyaan serta pihak yang diwawancarai atau terwawancara yang menjawab pertanyaan yang diajukan (Moleong, 2009: 186). Dalam penelitian ini, penulis berencana melaksanakan wawancara dengan beberapa informan yang terlibat langsung pada pembuatan desain kebijakan dan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di lingkup wilayah Jakarta Timur terkhusus daerah TPS Kramat Jati, Jakarta Timur untuk menunjang data penelitian.

1.6.5.3 Dokumentasi

Dokumen merupakan suatu catatan atau karya yang terlalu berlalu (Yusuf, 2014: 391). Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi merupakan suatu prosedur pengumpulan data terdokumentasi mengenai suatu individu atau sekelompok orang, peristiwa, kejadian pada keadaan sosial yang berkaitan pada pokok penelitian. Adapun dokumentasi pada penelitian ini berkaitan dengan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di lingkup wilayah Jakarta Timur terkhusus daerah TPS Kramat Jati, Jakarta Timur.

1.6.5.4 Studi Pustaka

Zed (2008) mengatakan bahwa studi pustaka adalah pengumpulan data penelitian dengan memanfaatkan sumber perpustakaan. Studi pustaka pada penelitian ini penulis dapatkan melalui buku, jurnal, penelitian terdahulu, literatur terkait, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan implementasi kebijakan pengelolaan

sampah di lingkup wilayah Jakarta Timur studi pengelolaan sampah di TPS Kramat Jati, Jakarta Timur.

1.6.6 Analisis Data

Analisis data untuk penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahapan yaitu reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan.

1.6.6.1 Reduksi Data

Reduksi data ialah merangkum data, menyesuaikan data dengan tema, memfokuskan data pada suatu hal penting dan pokok serta membuang data yang tidak perlu (Siyoto dan Sodik, 2015). Maka dari itu, maksud dari reduksi data tidak hanya menyederhanakan data yang didapatkan, tapi juga untuk memastikan data yang ada berkaitan dengan ruang lingkup penelitian.

1.6.6.2 Penyajian Data

Menurut Miles & Huberman (dalam Siyoto dan Sodik, 2015) penyajian data ialah berbagai macam informasi yang disajikan dengan terstruktur yang memberikan kesempatan untuk menarik kesimpulan. Data disajikan guna mengetahui gambaran besar atau bagian-bagian tertentu. Dalam fase ini, peneliti mencoba untuk mengelompokkan serta menyajikan data sejalan pada masalah penelitian utama.

1.6.6.3 Kesimpulan

Kesimpulan merupakan proses terakhir pada analisis data. Siyoto dan Sodik (2015) berpendapat bahwa, “dibuatnya kesimpulan memiliki tujuan untuk menemukan arti dari data-data yang tergabung melalui pencarian hubungan, persamaan maupun perbedaan”. Ditariknya suatu kesimpulan melalui perbandingan keabsahan subjek yang diteliti dan implikasi yang terkandung di dalamnya dengan konsep dasar penyelidikan.